



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DEDEN APRIANDHI HARTAWAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DPRD**
3. NHK : **79580**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.445.624.500**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 551 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, WARISAN Rp. 1.833.552.000
2. Tanah Seluas 560 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 228.123.000
3. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 132.804.000
4. Tanah Seluas 144 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 154.224.000
5. Tanah Seluas 522 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 88.357.500
6. Tanah Seluas 588 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, WARISAN Rp. 655.452.000
7. Tanah Seluas 67 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, WARISAN Rp. 77.112.000
8. Tanah Seluas 552 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 276.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **4.428.110.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 1.628.110.000



2. MOBIL, LAND ROVER DEVENDER Tahun 2023, HASIL SENDIRI

Rp. 2.800.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.675.625

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 245.186.379

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.500.000.000

Sub Total Rp. 10.648.596.504

III. HUTANG Rp. 2.576.633.006

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.071.963.498

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.